

APBD: Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Meningkat pada Januari-September 2023 Namun Penyerapan Belanja Daerah Rendah

Key messages:

- Realisasi penyaluran dana Transfer ke Daerah (TKD) hingga September 2023 mencapai Rp. 571,0 triliun (70,1% dari target anggaran), atau tumbuh 3,3% yoy.
- Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga September 2023 tercatat sebesar Rp. 234,2 triliun, atau tumbuh 3,6% yoy (65,3% dari target anggaran).
- Realisasi belanja daerah hingga September 2023 mencapai Rp. 701,51 triliun, atau tumbuh 5,5% yoy (54,8% dari target anggaran).
- Kami perkirakan belanja daerah mengalami percepatan pada kuartal IV-2023 untuk mengejar pencapaian realisasi anggaran.

Realisasi penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) hingga September 2023 meningkat 3,3% yoy

- Realisasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) hingga September 2023 tumbuh 3,3% yoy dengan nilai sebesar Rp. 571,0 triliun. Realisasi penyaluran TKD ini sudah mencapai 71,0% dari target anggaran 2023, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2022 yang sebesar 68,7% dari target. Sebagai informasi, proporsi dana TKD terhadap total pendapatan daerah sebesar 64,8%.
- Peningkatan realisasi penyaluran TKD didorong oleh peningkatan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik. DBH tumbuh 20,3% yoy pada Januari-September 2023 didorong oleh kenaikan pagu DBH khususnya jenis cukai hasil tembakau, minerba dan migas. Peningkatan ini seiring dengan kenaikan harga komoditas batu bara dan minyak bumi yang terjadi pada tahun 2022; kenaikan porsi pemerintah daerah untuk Cukai Hasil Tembakau dari 2% menjadi 3% dan Pajak Bumi dan Bangunan dari 90% menjadi 100% pada 2023. Pada 2022, penerimaan Pemerintah untuk PPh migas tumbuh 47,3%, penerimaan cukai hasil tembakau tumbuh 15,8% dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) SDA tumbuh 79,7%. Sementara itu, DAK Non Fisik tumbuh 16,8% yoy disebabkan peningkatan kepatuhan pemda dalam memenuhi syarat penyaluran DAK Non Fisik. Sebagai keterangan, DAK Non-Fisik merupakan dana TKD yang dialokasikan untuk mendanai program prioritas nasional non-fisik dan membantu operasionalisasi layanan publik. DAK Non-Fisik terdiri atas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOSP), dana tunjangan guru ASN daerah, dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), dan DAK Non-Fisik lainnya. Peningkatan penyaluran DAK Non-Fisik mencerminkan belanja pemda meningkat untuk program kesehatan dan pendidikan di daerah.
- Sebaliknya, realisasi Dana Alokasi Umum (DAU), DAK Fisik, Otonomi Khusus, Dana Desa dan Insentif Fiskal mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi penyaluran DAU pada 9M23 turun sebesar -2,1% yoy karena pengajian pegawai pemerintah dengan perjanjian (P3K) atau honorer di daerah masih menunggu pemenuhan syarat penyaluran dari Pemda. Sementara itu, Dana Desa turun sebesar -0,7% yoy pada 9M23 karena ketentuan anggaran BLT Desa lebih rendah dari tahun sebelumnya. Sebagai tambahan, Dana Desa dibagi menjadi dua yakni Dana Desa Non BLT dan Dana Desa BLT. Pada 2023, pemerintah menurunkan batas alokasi BLT Desa menjadi maksimal 25% dari pagu Dana Desa, menurun dari 2022 yang maksimal 40% dari pagu dana desa.

Pertumbuhan realisasi total Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 3,6% yoy pada Januari-September 2023 didorong oleh peningkatan pajak daerah hotel, restoran dan hiburan

- Total realisasi PAD seluruh pemda pada Januari-September 2023 (9M23) tumbuh 3,6% yoy dengan nilai sebesar Rp. 234,2 triliun. Realisasi PAD pada 9M23 ini sudah mencapai 65,3% dibandingkan target 2023, lebih rendah dibandingkan pencapaian tahun 2022 pada periode yang sama yang

mencapai 68,3% dari target. Sebagai informasi, proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah secara rata-rata dari seluruh pemerintah daerah sebesar 29,3%.

- Peningkatan PAD terutama didorong oleh penerimaan pajak daerah seiring dengan peningkatan mobilitas masyarakat, sehingga mendorong peningkatan penerimaan pajak hotel, restoran, hiburan dan parkir. Pertumbuhan keempat jenis pajak daerah tersebut tumbuh *double digit* pada periode Januari s.d. September 2023 dibandingkan periode yang sama tahun 2022. Lebih detail, selama periode Januari-September 2023 tersebut, pajak hotel tumbuh 58,5% yoy dengan nilai penerimaan sebesar Rp. 6,98 triliun; pajak hiburan tumbuh 47,3% yoy (Rp. 1,65 triliun); pajak restoran tumbuh 23,4% yoy (Rp. 11,1 triliun); dan pajak parkir tumbuh 20,5% yoy (Rp. 1,01 triliun).
- Kami melihat peningkatan PAD ini secara umum disebabkan oleh peningkatan mobilitas masyarakat yang terus terjadi pasca pembebasan restriksi mobilitas. Masyarakat banyak berpergian dan berwisata, termasuk makan di luar rumah. Salah satu indikator yang menunjukkan peningkatan aktivitas bepergian dan berwisata adalah rata-rata *occupancy rate* nasional yang meningkat menjadi 49,4% pada Januari-September 2023 dari 45,4% pada Januari-September 2022.
- Sebagai tambahan terkait pariwisata di Provinsi Bali, pajak hotel di provinsi ini pada periode Januari-September 2023 tumbuh sangat tinggi mencapai 195,4% yoy dengan total penerimaan sebesar 2,82 triliun. Peningkatan pajak hotel yang sangat tinggi ini seiring dengan peningkatan jumlah wisatawan baik domestik maupun mancanegara ke Bali. Jumlah wisatawan mancanegara (wisman) melalui Bandara Ngurah Rai pada periode Januari-September 2023 mencapai 3,91 juta kunjungan, jauh lebih tinggi daripada periode Januari-September 2022 yang hanya sebanyak 1,19 juta kunjungan. Demikian pula, jumlah wisatawan domestik yang menuju Bali pada periode Januari-September 2023 mencapai 13,4 juta kunjungan, lebih tinggi daripada periode yang sama tahun 2022 yang sebanyak 8,1 juta kunjungan.

Realisasi belanja daerah pada 9M23 tumbuh 5,5% yoy namun penyerapannya baru mencapai 54,8% dari anggaran

- Realisasi belanja daerah pada periode Januari-September 2023 (9M23) tumbuh 5,5% yoy dengan nilai belanja sebesar Rp. 701,51 triliun. Dibandingkan dengan pagu anggaran, realisasi belanja daerah pada 9M23 ini baru mencapai 54,8%, lebih rendah daripada 9M22 yang sebesar 55,3%. Sebagai tambahan, belanja daerah yang terbesar adalah belanja pegawai sebesar 39,3% dari total belanja pemerintah daerah, disusul belanja barang dan jasa (27,3%) dan belanja modal (10,9%).
- Realisasi belanja pegawai pemerintah daerah pada 9M23 tumbuh 2,1% yoy, atau mencapai 64,5% dari pagu anggaran APBD 2023, sedikit lebih rendah daripada penyerapan belanja pegawai pada 9M22 yang sebesar 65,5%.
- Realisasi belanja barang dan jasa daerah pada 9M23 tumbuh 5,2% yoy, didorong oleh kenaikan belanja barang, jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas. Meskipun tumbuh positif, penyerapan belanja barang dan jasa pada 9M23 ini lebih rendah daripada 9M22 (52% vs 53,8%). Artinya, pertumbuhan belanja ini relatif kurang tinggi dibandingkan tahun 2022 untuk periode yang sama. Realisasi belanja barang dan jasa pemerintah daerah yang lambat adalah permasalahan lama yang selalu berulang.
- Sementara itu, realisasi belanja modal pemerintah daerah tumbuh 14,6% pada 9M23, atau baru mencapai 36,1% dari pagu anggaran APBD 2023, tapi membaik dari penyerapan belanja modal pada 9M22 yang sebesar 35,1%. Pola penyerapan belanja modal di daerah yang lambat memang sudah menjadi pola tahunan, sehingga perlu diperbaiki agar bisa lebih cepat dan memiliki daya dorong terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dalam setahun.

Dana pemerintah daerah semua provinsi dan kabupaten/kota di perbankan per September 2023 menurun sebesar 11,2 triliun dibandingkan September 2022.

- Dana pemerintah daerah semua provinsi dan kabupaten/kota di perbankan per September 2023 tercatat sebesar Rp. 219,4 triliun, menurun dibandingkan per September 2022 yang sebesar Rp. 230,6 triliun. Alasannya, peningkatan realisasi belanja daerah pada periode Januari s.d. September 2023 yang lebih tinggi daripada realisasi pendapatan daerah, menyebabkan saldo dana pemerintah daerah di perbankan menurun per September 2023. Pada periode Januari s.d. September 2023, pendapatan pemerintah daerah semua provinsi dan kabupaten/kota meningkat sebesar Rp 26,5 triliun. Peningkatan ini bersumber dari peningkatan PAD sebesar Rp 2,8 triliun dan TKDD sebesar Rp 18,3 triliun. Sementara itu, belanja pemerintah daerah pada periode yang sama meningkat sebesar Rp 36,9 triliun. Berdasarkan pendekatan ini, saldo pemerintah daerah berkurang Rp 10,4 triliun.
- Menurut pulau, dana pemda di perbankan wilayah Kalimantan tumbuh tertinggi pada September 2023, yaitu sebesar 82,2% yoy dengan saldo sebesar Rp. 44,2 triliun. Alasannya, Dana Bagi Hasil (DBH) di provinsi-provinsi di Pulau Kalimantan meningkat seiring dengan kenaikan harga komoditas batubara, migas dan CPO pada 2022. Sebagai contoh, realisasi DBH provinsi Kalimantan Selatan mencapai Rp. 6,2 triliun, atau tumbuh 68,4% yoy pada Januari-September 2023 dan realisasi DBH Kalimantan Timur mencapai Rp. 9,5 triliun, atau tumbuh 64,3% yoy Januari-September 2023.
- Kami melihat secara historis selama 5 tahun terakhir, dana pemda di perbankan di semua wilayah akan meningkat hingga Oktober, namun kemudian menurun pada bulan November-Desember. Pergerakan dana pemda di perbankan ini menunjukkan bahwa penyerapan belanja menumpuk pada akhir tahun.
- Sebagai tambahan, penyerapan belanja pemda secara rata-rata selama 2018-2022 hanya mencapai 93%. Penyerapan belanja yang tidak mencapai 100% ini terkait erat dengan saldo dana pemerintah daerah di perbankan yang mencapai Rp. 114 triliun pada setiap akhir tahun.

View ke depan

- Kami perkirakan belanja pemerintah daerah akan mengalami akselerasi pada 4Q23 seiring dengan percepatan penyerapan belanja pemda. Akselerasi belanja ini akan tercermin dari penurunan dana pemda di perbankan pada bulan November dan Desember.
- Kami melihat pola belanja daerah yang menumpuk pada akhir tahun perlu diperbaiki ke depan agar daya dorong belanja pemerintah lebih merata dalam satu tahun. Oleh karena itu, akselerasi belanja daerah pada awal tahun terutama belanja modal yang selalu paling telat penyerapannya.
- Sebagai informasi, untuk tahun 2024, dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) meningkat sebesar 3,9% sesuai RAPBN 2024 menjadi Rp 857,6 triliun. Dengan demikian, belanja pemerintah daerah pun akan meningkat. Berdasarkan kebijakan Kemenkeu, belanja TKDD pada 2024 difokuskan untuk kegiatan yang produktif, yaitu dialokasikan untuk program-program yang memiliki *multiplier effect* tinggi. Selain itu, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan harmonisasi kebijakan dan pengalokasian dana TKDD untuk mengatasi *stunting*, kemiskinan, inflasi dan investasi.

Realisasi Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)

Komponen	Jan-Sept 2022 (Rp. Triliun)			Jan-Sept 2023 (Rp. Triliun)			Pertumbuhan %yoy
	Target Anggaran 2022	Realisasi	%Realisasi thd Target	Target Anggaran 2023	Realisasi	%Realisasi thd Target	
Transfer ke Daerah	804.8	552.7	68.7	804.0	571.0	71.0	3.3
1. Dana Bagi Hasil	140.4	64.0	45.6	128.1	77.0	60.1	20.3
2. Dana Alokasi Umum	378.0	309.4	81.8	396.0	302.8	76.5	-2.1
3. Dana Transfer Khusus	189.6	110.1	58.1	186.6	124.7	66.9	13.3
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	60.9	25.4	41.7	53.4	24.4	45.7	-3.9
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	128.7	84.7	65.8	129.9	98.9	76.1	16.8
c. Hibah ke Daerah	-	-	-	3.2	1.4	44.3	-
4. Dana Otsus	20.4	11.0	53.6	17.2	9.9	57.1	-10.1
5. Dana Keistimewaan D.I.Y	1.3	1.1	80.3	1.4	1.1	76.8	2.8
6. Dana Desa	68.0	53.1	78.1	70.0	52.8	75.4	-0.7
7. Insentif Fiskal	7.0	4.1	58.6	4.7	2.8	60.7	-31.0

Sumber: Kemenkeu

Pertumbuhan & Penyerapan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Periode Januari - September 2023

Komponen	Jan-Sept 2022 (Rp. Triliun)			Jan-Sept 2023 (Rp. Triliun)			Pertumbuhan %yoy
	Target Anggaran 2022	Realisasi	%Realisasi thd Target	Target Anggaran 2023	Realisasi	%Realisasi thd Target	
PAD	330.9	226.0	68.3	358.5	234.2	65.3	3.6
Pajak Daerah	230.2	165.0	71.6	253.9	174.9	68.9	6.1
Retribusi Daerah	14.0	5.8	41.2	13.0	6.0	46.3	4.7
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.9	9.9	83.6	14.4	11.1	76.8	11.4
Lain-Lain PAD yang Sah	74.8	45.4	60.7	77.2	42.2	54.6	-7.1

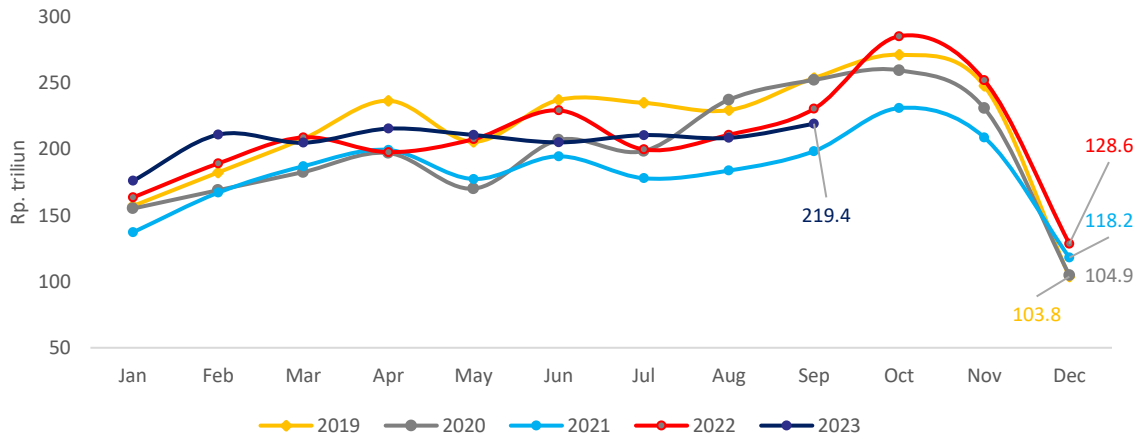
Sumber: Kemenkeu

Pertumbuhan & Penyerapan Realisasi Belanja Daerah Periode Januari-September 2023

Komponen	Jan-Sept 2022 (Rp. Triliun)			Jan-Sept 2023 (Rp. Triliun)			Pertumbuhan %yoy
	Target Anggaran 2022	Realisasi	%Realisasi thd Target	Target Anggaran 2023	Realisasi	%Realisasi thd Target	
Total Belanja	1,200.9	664.7	55.3	1,278.2	701.5	54.9	5.5
Belanja Pegawai	411.5	269.7	65.5	426.8	275.4	64.5	2.1
Belanja Barang dan Jasa	338.1	181.8	53.8	367.7	191.4	52.0	5.2
Belanja Modal	190.2	66.7	35.1	211.8	76.4	36.1	14.6
Belanja Lainnya	261.2	146.5	56.1	271.9	158.3	58.2	8.1

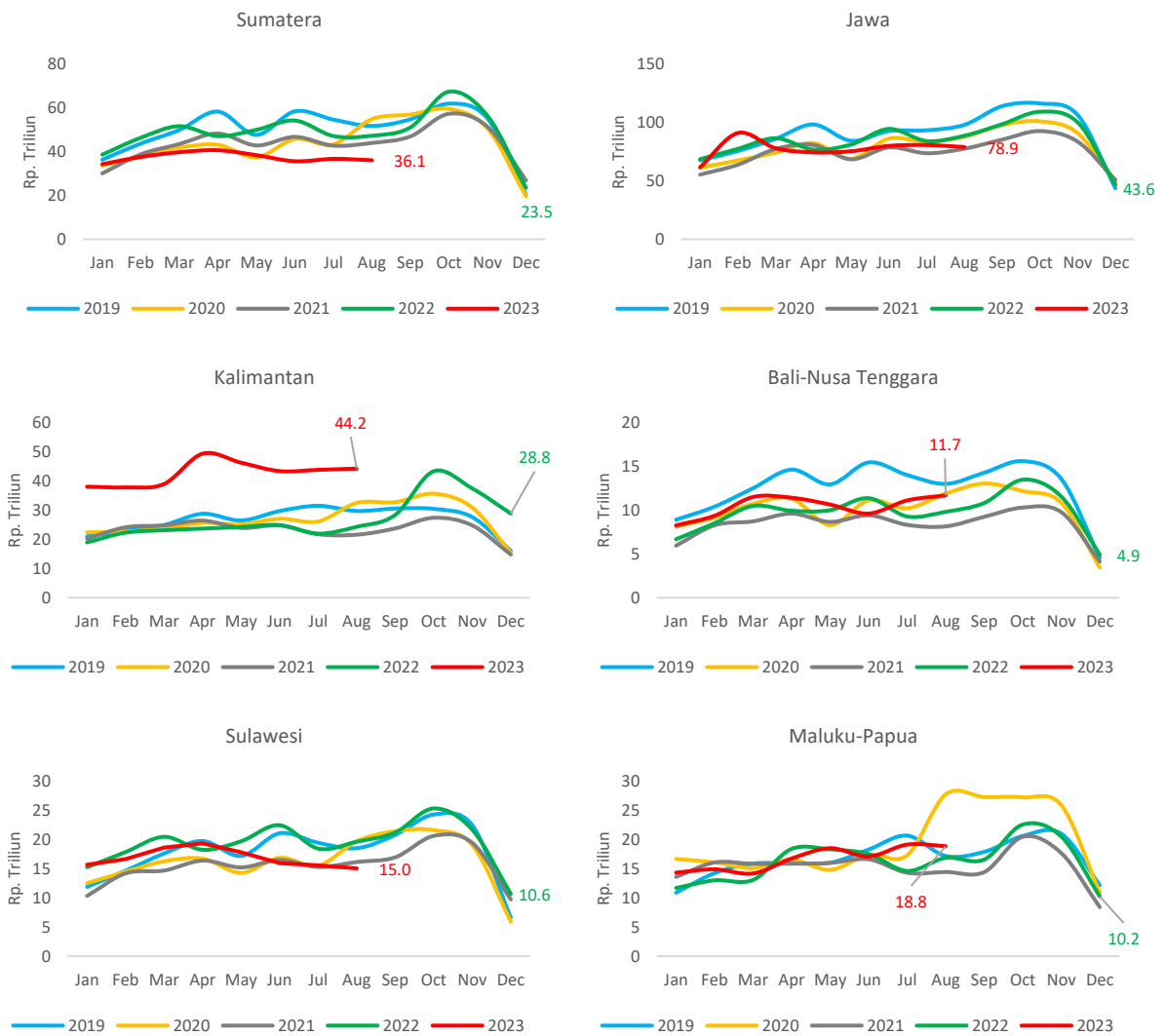
Sumber: Kemenkeu

Perkembangan Dana Pemda di Perbankan



Sumber: Bank Indonesia

Perkembangan Dana Pemda di Perbankan Menurut Pulau



Sumber: Bank Indonesia

Our Team
Industry and Regional Research Department

Chief Economist

Andry Asmoro

Head of Industry and Regional Research

Dendi Ramdani

Analysts

Nadia Kusuma Dewi

Mamay Sukaesih

Haris Eko Faruddin

Ahmad Zuhdi Dwi Kusuma

Abrar Aulia

Muhammad Osribillal

Stella Kusumawardhani

Email: oce@bankmandiri.co.id

Website: www.mandiri-research.or.id

Disclaimer: This material is for information only. The information herein has been obtained from sources believed to be reliable, but we do not warrant that it is accurate or complete, and it should not be relied upon as such. Opinion expressed is our current opinion as of the date appearing on this material only, and subject to change without notice. It is intended for the use by recipient only and may not be reproduced or copied/photocopied or duplicated or made available in any form, by any means, or redistributed to others without written permission from PT Bank Mandiri, Tbk. For further information please contact: **Office of Chief Economist**, Phone. (021) 524 5272 or Fax. (021) 521 0430.